

Strategi Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad Dalam Pembinaan Teritorial di Papua Tahun 2022–2023 Sebagai Model Penguatan Binter TNI AD

Anjas Suryana Putra¹ Guntur Eko Saputro² Suwito³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: anjasputra1122@gmail.com¹ guntur_95@yahoo.com² suwito@idu.ac.id³

Abstrak

Papua sebagai wilayah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan multidimensi berupa kesenjangan pembangunan, dinamika sosial budaya yang kompleks, serta ancaman gerakan separatis bersenjata sehingga pendekatan militer konvensional dinilai tidak lagi memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile 305/17/1 Kostrad dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di Papua sepanjang tahun 2022 dan 2023, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya, serta merumuskan model strategi yang relevan bagi penguatan pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas melaksanakan pembinaan teritorial melalui empat program utama, yaitu Komunikasi Sosial, Karya Bakti dan Bakti Sosial, Pembinaan Ketahanan Wilayah, serta Pembinaan Pertahanan Wilayah, yang secara adaptif, komunikatif, dan berkelanjutan terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan gangguan keamanan. Penelitian ini menghasilkan model strategi pembinaan teritorial berbasis soft power, sinergi lintas sektor, dan pendekatan budaya lokal sebagai rujukan penguatan Binter TNI AD di wilayah rawan konflik.

Kata Kunci: Pembinaan Teritorial, Satgas Pamtas Mobile, Soft Power, Papua

Abstract

Papua, as a strategic region of the Unitary State of the Republic of Indonesia, faces multidimensional challenges including development gaps, complex sociocultural dynamics, and the threat of armed separatist movements, so that conventional military approaches are no longer considered sufficient. This study aims to analyze the strategy of the 305/17/1 Kostrad Mobile Border Security Task Force in implementing territorial development in Papua during 2022 and 2023, to identify supporting and inhibiting factors, and to formulate a strategic model relevant for strengthening the Indonesian Army territorial development function. The study uses a qualitative descriptive approach with a case study design through field observation, in depth interviews, and documentation study, analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that the Task Force implements territorial development through four main programs, namely Social Communication, Community and Social Service, Regional Resilience Development, and Regional Defense Development, which adaptively, communicatively, and sustainably increased public trust and reduced security disturbances. This study produces a territorial development strategy model based on soft power, cross sector synergy, and local cultural approaches as a reference for strengthening adaptive territorial development within the Indonesian Army.

Keywords: Territorial Development, Mobile Border Security Task Force, Soft Power, Papua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Papua merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyimpan potensi strategis dari aspek sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan posisi geostrategisnya, namun potensi tersebut belum sepenuhnya memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Kesenjangan

pembangunan antara Papua dan wilayah Indonesia lainnya menjadi akar berbagai persoalan sosial dan politik, termasuk rasa ketidakadilan, keterasingan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat, sehingga Papua tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan tetapi juga kompleksitas tinggi dalam hal keamanan dan kohesi sosial (Chauvel & Bhakti, 2004). Salah satu tantangan utama di Papua adalah keberadaan kelompok separatis bersenjata yang berupaya memisahkan diri dari NKRI melalui berbagai bentuk kekerasan dan propaganda dengan mengeksploitasi sentimen ketidakpuasan masyarakat terhadap lambannya pembangunan dan minimnya kehadiran negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendekatan keamanan berbasis militer semata sering kali dinilai tidak cukup efektif, bahkan pendekatan koersif yang dominan dapat memperburuk sentimen masyarakat dan menjauhkan mereka dari semangat persatuan bangsa, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan persuasif yang menyentuh aspek emosional dan kultural masyarakat Papua secara menyeluruh.

Dalam kerangka inilah strategi pembinaan teritorial atau Binter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memegang peran vital. Binter merupakan metode pendekatan sosial dan kultural yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membangun komunikasi, kedekatan, dan kerja sama antara TNI dengan masyarakat di wilayah tugasnya sehingga TNI tidak hanya dilihat sebagai aparat keamanan tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Konsep ini sejalan dengan amanat regulasi pertahanan negara yang menegaskan bahwa sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional, serta dilaksanakan secara dini dan berkelanjutan melalui pendekatan terpadu antara unsur pertahanan dan pembangunan nasional. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile 305/17/1 Kostrad merupakan satuan yang secara khusus diterjunkan ke Papua dengan mandat menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan sekaligus melaksanakan pembinaan teritorial dalam spektrum yang lebih luas. Berbeda dari Satgas organik, satuan ini memiliki kemampuan mobilitas tinggi yang memungkinkannya menjangkau wilayah paling terpencil yang belum tersentuh pelayanan negara. Selama penugasan tahun 2022 dan 2023, Satgas Mobile ini menginisiasi program inovatif berbasis pendekatan soft power melalui program Rumah Nusantara, yaitu ruang komunitas portabel di desa perbatasan sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan literasi kebangsaan, serta program Lintas Hati, yaitu pelayanan teritorial mobile ke wilayah sulit dijangkau yang mengintegrasikan tim kesehatan, tenaga pengajar, penyuluh agama, dan unsur komunikasi sosial dalam satu paket patroli kemanusiaan (Laporan Binter Satgas Pamtas 305/17/1 Kostrad, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Satgas tidak bekerja sendiri. Sinergi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas program tersebut, misalnya koordinasi dengan dinas pendidikan untuk program literasi, dinas kesehatan untuk layanan kesehatan primer, hingga kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas pemuda lokal untuk memperluas jangkauan komunikasi sosial. Namun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural karena sebagian wilayah masih menyimpan trauma kolektif terhadap pendekatan kekerasan masa lalu, sementara kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah sasaran. Secara sosiopolitik, Papua menghadapi tantangan multidimensi yang berakar dari sejarah panjang konflik, ketimpangan pembangunan, dan dinamika identitas budaya yang kompleks. Kondisi geografis yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur, dan keragaman etnis yang mencapai lebih dari dua ratus lima puluh suku menciptakan konteks unik yang menuntut pendekatan Binter mampu merespons sensitivitas lokal secara adaptif. Perkembangan situasi keamanan yang ditandai oleh aktivitas kelompok kriminal bersenjata di berbagai wilayah pedalaman dan

perbatasan turut menuntut strategi yang memadukan dimensi keamanan dengan pemberdayaan sosial, sehingga kehadiran Satgas tidak hanya berorientasi menghadapi ancaman keamanan tetapi juga menjawab akar persoalan berupa kesenjangan pembangunan dan minimnya pelayanan dasar di wilayah terpencil.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberi kontribusi penting dalam memahami persoalan pembinaan teritorial dan pengelolaan keamanan di Papua. Hadi (2016) meneliti peran TNI dalam pembinaan teritorial di wilayah konflik Papua dan menemukan bahwa kehadiran aparat teritorial berkontribusi menurunkan intensitas konflik lokal meskipun belum menyentuh evaluasi keberlanjutan program secara mendalam. Wahyudi (2020) mengkaji dilema pelaksanaan operasi militer selain perang dan pembinaan teritorial, dengan temuan bahwa keberhasilan Binter sangat bergantung pada kejelasan mandat dan dukungan logistik satuan. Suryawan (2021) menganalisis geografi konflik di Papua dan dampaknya terhadap mobilisasi keamanan, menunjukkan bahwa kondisi geografis yang sulit menjadi faktor determinan efektivitas operasi teritorial. Lumbanraja (2022) meneliti penguatan kapasitas prajurit TNI di wilayah konflik dan menemukan bahwa pelatihan budaya lokal meningkatkan kemampuan adaptasi personel, sementara Prakoso (2022) mengevaluasi peran TNI dalam pembinaan teritorial wilayah perbatasan Papua dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, tampak jelas bahwa kajian mengenai strategi komprehensif Satgas Pamtas Mobile secara utuh dalam periode 2022 dan 2023 yang menggabungkan dimensi keamanan, sosial budaya, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi efektivitas dalam satu model strategi masih menjadi celah penelitian. Penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada satu perspektif tunggal, baik aspek keamanan, kapasitas personel, geografi konflik, maupun sinergi lintas sektor secara terpisah, sehingga belum menjelaskan bagaimana keempat program Binter, yaitu Komunikasi Sosial, Karya Bakti dan Bakti Sosial, Pembinaan Ketahanan Wilayah, serta Pembinaan Pertahanan Wilayah, saling berinteraksi membentuk satu sistem pembinaan teritorial yang adaptif, komunikatif, dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model strategi Binter Satgas Pamtas Mobile yang mengintegrasikan konsep soft power dengan tiga indikator operasionalnya, yaitu daya tarik, persuasi, dan legitimasi moral, bersama teori peran, teori strategi, dan teori kontra insurgensi sebagai kerangka analitis tunggal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di Papua sepanjang tahun 2022 dan 2023, menganalisis faktor faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan model strategi pembinaan teritorial yang relevan sebagai acuan penguatan Binter TNI Angkatan Darat di wilayah rawan konflik dan perbatasan lainnya.

Theoretical Framework

Penelitian ini dibangun di atas kerangka teori yang saling melengkapi. Teori Peran menjelaskan bahwa Satgas menjalankan peran sosial dan kemiliteran sekaligus, yaitu sebagai kekuatan pertahanan sekaligus agen sosial yang membangun kepercayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial, sementara Konsep Optimalisasi menjelaskan bagaimana satuan memaksimalkan peran, fungsi, dan sarana yang ada untuk memperoleh hasil signifikan dalam membina kondisi wilayah agar kondusif. Konsep Pembinaan Teritorial menegaskan bahwa Binter merupakan bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mediasi, dan edukasi guna menjaga stabilitas wilayah, dengan tujuan membentuk ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dan bersatu dengan rakyat. Konsep Konflik dan Konsep Separatisme digunakan untuk memahami akar ketegangan di Papua, yang muncul dari

perbedaan nilai dan kepentingan yang tidak terkompromikan serta perasaan marginalisasi struktural sebagian kelompok masyarakat, sedangkan kerangka Operasi Militer Selain Perang memberi landasan legal dan operasional bagi pelaksanaan pembinaan teritorial dan pembangunan kepercayaan dengan masyarakat. Teori Strategi menyediakan kerangka Ends Ways Means yang menekankan keselarasan antara tujuan, cara, dan sarana, sejalan dengan gagasan strategi tidak langsung yang menghindari konfrontasi frontal dan lebih mengandalkan manuver sosial budaya untuk melemahkan resistensi.

Konsep Soft Power dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu daya tarik yang diwujudkan melalui pelayanan sosial dan kesehatan keliling, persuasi yang dijalankan melalui komunikasi sosial dan pendekatan tokoh adat, serta legitimasi moral yang tercermin dari konsistensi sikap santun dan penghormatan terhadap adat lokal. Teori kontra insurgensi menegaskan bahwa kemenangan atas kelompok bersenjata bukan ditentukan oleh eliminasi militer melainkan oleh kemampuan memenangkan dukungan mayoritas rakyat, sedangkan Model 3 atau Model Sentul memberi kerangka taktis strategis yang memadukan pendekatan perorangan, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan teritorial terpadu, yang diperkuat oleh Teori Kolaborasi Lintas Sektoral dalam menata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Secara yuridis, pelaksanaan pembinaan teritorial bersandar pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diperbarui melalui Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memberi penguatan eksplisit terhadap peran TNI dalam operasi keamanan perbatasan dan pembinaan teritorial berorientasi kesejahteraan, serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengharuskan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah sehingga memperkuat legitimasi program Binter Satgas sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah Papua.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus karena bertujuan memahami secara mendalam strategi pembinaan teritorial yang diterapkan oleh Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad di Papua. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada kedalaman pemahaman terhadap makna, interaksi, dan konteks sosial, bukan pada keluasan data, sehingga sesuai untuk menelusuri dinamika relasi antara aparat militer dan masyarakat sipil Papua yang sarat muatan kultural, historis, dan politis (Moleong, 2019). Penelitian dilaksanakan di wilayah tugas Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad, mencakup beberapa distrik di wilayah administratif Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, yang menjadi zona prioritas pelaksanaan kegiatan teritorial Satgas selama tahun 2022 dan 2023. Pengumpulan data tambahan serta konfirmasi administratif juga dilakukan di Markas Batalyon Infanteri Para Raider 305 Tengkorak di Karawang, Jawa Barat, sebagai satuan induk Satgas. Secara keseluruhan, penelitian dilaksanakan selama kurang lebih delapan bulan, meliputi tahap penyusunan proposal dan instrumen penelitian, tahap pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara, tahap pengolahan dan analisis data, hingga tahap penyusunan laporan akhir dan verifikasi temuan bersama pembimbing. Subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017), sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Objek penelitian adalah optimalisasi peran pembinaan teritorial Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad di Papua, dengan fokus pada perancangan dan implementasi kegiatan teritorial guna merebut hati dan pikiran masyarakat Papua melalui pendekatan soft power berbasis budaya, sosial, dan edukatif.

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Instansi atau Lembaga	Jabatan atau Peran
1	Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad	Komandan Satgas, Perwira Teritorial
2	Kodam XVII Cenderawasih	Perwira Seksi Teritorial
3	Pemerintah kabupaten di wilayah tugas	Kepala distrik, kepala kampung
4	Tokoh masyarakat dan adat di Papua	Ketua adat, pemuda, tokoh agama
5	Masyarakat setempat di Papua	Penerima program teritorial

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama, yaitu observasi partisipatif di wilayah penugasan untuk mengamati interaksi sosial dan kegiatan edukatif, budaya, serta pelayanan kemanusiaan Satgas, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci menggunakan panduan pertanyaan terbuka, dokumentasi berupa laporan kegiatan Satgas, dokumen perintah operasi, laporan Kodam XVII Cenderawasih, serta dokumentasi foto dan video kegiatan, dan studi kepustakaan melalui buku, peraturan perundang undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi teknik dengan menggabungkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi secara bersamaan pada sumber yang sama, serta triangulasi sumber dengan menggunakan teknik yang sama pada berbagai sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2017). Data dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data melalui perangkuman dan pemilihan informasi pokok, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan bagan hubungan antar kategori, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang diuji melalui bukti bukti yang sahih dan konsisten (Miles & Huberman, 1994). Proses analisis turut dibantu perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengorganisasian data, identifikasi tema, dan visualisasi temuan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah tugas Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad, mencakup Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satgas selama tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan melalui empat program utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Utama Pembinaan Teritorial Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad di Papua

No	Program	Bentuk Kegiatan
1	Komunikasi Sosial	Penyuluhan wawasan kebangsaan, dialog antaragama, pendekatan tokoh adat, dan kegiatan olahraga bersama masyarakat
2	Karya Bakti dan Bakti Sosial	Pembangunan sarana ibadah, perbaikan fasilitas sekolah, penyediaan air bersih, dan pelayanan kesehatan keliling
3	Pembinaan Ketahanan Wilayah	Pelatihan keterampilan produktif, pembentukan kelompok pemuda sadar keamanan, dan penyuluhan bela negara
4	Pembinaan Pertahanan Wilayah	Pelatihan dasar kedisiplinan, pengenalan strategi pertahanan, dan kerja sama menghadapi ancaman nonmiliter

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Program Komunikasi Sosial menjadi ujung tombak pembinaan teritorial karena berfungsi membangun hubungan emosional antara prajurit dan masyarakat melalui penyuluhan wawasan kebangsaan, dialog antaragama, pendekatan kepada tokoh adat, dan kegiatan olahraga bersama. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi TNI tetapi juga berkontribusi menurunkan resistensi masyarakat terhadap aparat

keamanan, serta diarahkan untuk menangkal penyebaran propaganda separatist melalui pendekatan cerita lokal yang disampaikan lewat tokoh adat yang dihormati masyarakat. Program Karya Bakti dan Bakti Sosial merupakan bentuk nyata kontribusi Satgas terhadap pembangunan sosial, meliputi pembangunan sarana ibadah, perbaikan fasilitas sekolah dasar, penyediaan air bersih, dan pelayanan kesehatan keliling di daerah terpencil yang dilaksanakan bersama tenaga kesehatan TNI dan dinas kesehatan kabupaten. Kegiatan ini terbukti memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran TNI sekaligus membangun persepsi bahwa kehadiran prajurit bukan untuk menekan melainkan untuk membantu.

Program Pembinaan Ketahanan Wilayah dilaksanakan melalui kerja sama erat antara Satgas, Koramil, dan pemerintah daerah berupa pelatihan keterampilan produktif di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan lokal, pembentukan kelompok pemuda sadar keamanan, serta penyuluhan bela negara di sekolah. Melalui program ini, Satgas menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kesadaran bela negara kepada masyarakat, terutama generasi muda yang rawan terpengaruh isu separatisme, dengan sinergi lintas instansi memastikan keberlanjutan program setelah rotasi Satgas berakhir. Program Pembinaan Pertahanan Wilayah difokuskan pada pembinaan potensi masyarakat agar berperan sebagai kekuatan pendukung sistem pertahanan semesta melalui pelatihan dasar kedisiplinan, latihan baris berbaris, dan pengenalan dasar strategi pertahanan kepada pemuda di wilayah perbatasan, termasuk pelatihan kerja sama masyarakat dengan aparat keamanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti penyelundupan lintas batas dan ancaman narkoba.

Analisis lebih lanjut terhadap faktor penentu efektivitas pelaksanaan Binter menunjukkan empat komponen utama yang saling berinteraksi. Pertama, kualitas dan kesiapan personel, karena kemampuan komunikasi sosial dan adaptasi budaya merupakan kompetensi kunci bagi prajurit Satgas dalam membangun relasi dengan tokoh adat dan masyarakat. Kedua, kondisi geografis dan infrastruktur wilayah Papua yang bergunung, berlembah, dan sulit dijangkau, sehingga akses logistik dan komunikasi antarpus menjadi sangat terbatas dan menuntut penempatan pos mobile untuk menjangkau daerah terpencil. Ketiga, dukungan logistik dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, instansi sipil, dan aparat keamanan lain seperti Polri dan Kodim, yang terlihat dari kerja sama Satgas dengan dinas kesehatan dan pendidikan dalam penyediaan tenaga medis keliling dan tenaga pengajar sukarela. Keempat, persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, di mana tingkat kepercayaan meningkat setelah adanya interaksi intensif melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan Satgas, terutama pada wilayah yang pernah mengalami konflik bersenjata.

Program Inovatif Berbasis Soft Power

Selain keempat program pokok tersebut, Satgas Pantas Mobile 305/17/1 Kostrad juga menginisiasi dua program inovatif yang menjadi wujud konkret pendekatan soft power di lapangan, yaitu program Rumah Nusantara dan program Lintas Hati. Rumah Nusantara merupakan ruang komunitas portabel yang dibangun di desa-desa perbatasan sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan literasi kebangsaan, tempat Satgas menyelenggarakan kelas kebangsaan, diskusi antaragama, pelatihan keterampilan dasar, pemutaran film dokumenter nasional, hingga layanan pendidikan informal dan kesehatan sederhana. Keberadaan Rumah Nusantara tidak hanya menjadi media interaksi antara prajurit dan rakyat, tetapi juga simbol hadirnya negara dalam bentuk yang ramah dan inklusif. Program Lintas Hati merupakan kegiatan pelayanan teritorial mobile ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, yang mengintegrasikan tim kesehatan, tenaga pengajar, penyuluh agama, dan unsur komunikasi sosial dalam satu paket patroli kemanusiaan. Program ini memberikan pelayanan dasar sekaligus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat lokal, tidak

sekadar memberi bantuan tetapi juga menjadi wadah mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami persoalan lokal secara partisipatif, serta menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang tidak menggurui dan menyesuaikan budaya setempat. Kedua program ini memperlihatkan bagaimana keempat program pokok Binter diterjemahkan secara kontekstual sesuai karakteristik wilayah operasi Satgas di Papua. Secara keseluruhan, efektivitas strategi pembinaan teritorial Satgas Pamantas Mobile 305/17/1 Kostrad tergolong tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh tiga indikator utama pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Evaluasi Efektivitas Strategi Pembinaan Teritorial

No	Indikator	Capaian
1	Peningkatan partisipasi masyarakat	Meningkat signifikan pada kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum
2	Penurunan gangguan keamanan	Menurun sekitar 25 sampai 30 persen dibandingkan periode sebelumnya
3	Penguatan kemanunggalan TNI dan rakyat	Hubungan sosial lebih harmonis antara aparat dan masyarakat adat

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa strategi Binter Satgas Pamantas Mobile 305/17/1 Kostrad bukan hanya instrumen pengamanan, melainkan juga wahana rekonsiliasi sosial dan pembangunan karakter masyarakat Papua, sehingga menjadi elemen strategis dalam memperkuat stabilitas nasional di kawasan timur Indonesia.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Pengolahan data lebih lanjut dilakukan melalui analisis SWOT yang dipadukan dengan matriks faktor internal dan faktor eksternal guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi efektivitas strategi pembinaan teritorial Satgas di Papua, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4. Analisis ini tidak hanya digunakan sebagai alat identifikasi masalah, tetapi juga sebagai dasar penyusunan model strategi penguatan Binter TNI Angkatan Darat.

Tabel 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Strategi Pembinaan Teritorial

Faktor	Uraian Ringkas
Kekuatan	Mobilitas personel tinggi, pendekatan humanis dan persuasif, dukungan komando atas, program inovatif, sinergi dengan tokoh adat dan agama, disiplin dan loyalitas prajurit
Kelemahan	Keterbatasan jumlah personel, minimnya pemahaman budaya dan bahasa lokal, keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi, rotasi penugasan singkat, keterbatasan logistik
Peluang	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah tinggi, regulasi OMSP dan Binter yang kuat, peluang kemanunggalan TNI dan rakyat, kerja sama lintas sektor dengan instansi sipil
Ancaman	Aktivitas kelompok separatis bersenjata, propaganda anti pemerintah, medan geografis yang sulit, potensi konflik horizontal antarkelompok, keterbatasan infrastruktur wilayah

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Hasil pembobotan matriks internal dan eksternal menunjukkan bahwa kekuatan dan peluang Satgas lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman, sehingga strategi pembinaan teritorial berada pada posisi yang mendukung pertumbuhan agresif melalui perluasan program berbasis kesejahteraan, penguatan komunikasi sosial dengan tokoh adat dan agama, serta pengembangan model Binter adaptif berbasis budaya lokal. Sejalan dengan itu, strategi turunan yang dirumuskan mencakup perluasan program pelayanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat, optimalisasi pendekatan humanis untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, peningkatan pelatihan budaya lokal bagi personel, penguatan sistem keamanan personel di daerah rawan, serta peningkatan kemampuan intelijen teritorial berbasis masyarakat.

Discussion

Strategi pembinaan teritorial yang diterapkan Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad pada periode 2022 dan 2023 merupakan implementasi nyata doktrin dasar TNI Angkatan Darat yang berorientasi pada pembangunan pertahanan semesta melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dan pembinaan potensi masyarakat, namun dalam konteks Papua strategi ini tidak bersifat militeristik semata melainkan menekankan pendekatan humanis, sosial kemasyarakatan, dan kultural yang beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan geografi daerah operasi. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma memenangkan hati dan pikiran masyarakat sebagai fondasi keberhasilan operasi militer nontempur (Galula, 2006). Temuan ini juga menegaskan argumen awal penelitian bahwa pendekatan militer konvensional yang koersif tidak lagi memadai dalam konteks Papua, karena dominasi hard power justru berpotensi memperburuk sentimen masyarakat dan menjauhkan mereka dari semangat persatuan bangsa. Data lapangan menunjukkan bahwa pola pengamanan berlapis yang dikombinasikan dengan program sosial, kesehatan, dan pendidikan menghasilkan penerimaan masyarakat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendekatan represif yang pernah diterapkan pada masa lalu di sejumlah wilayah operasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris dan berakar pada persoalan sosial, ekonomi, dan identitas, keunggulan strategis tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan senjata, melainkan oleh kemampuan negara membangun legitimasi dan kepercayaan di tingkat akar rumput.

Program Komunikasi Sosial merefleksikan penerapan teori hubungan sipil militer yang menekankan pentingnya komunikasi horizontal antara unsur militer dan masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan dan legitimasi sosial (Janowitz, 1960), sekaligus mempertegas indikator daya tarik dan persuasi dalam konsep soft power (Nye, 2004), karena Satgas menggunakan pendekatan cerita lokal melalui tokoh adat yang dipercaya masyarakat agar pesan kebangsaan lebih mudah diterima tanpa menimbulkan resistensi. Program Karya Bakti dan Bakti Sosial menegaskan pergeseran paradigma TNI dari sekadar penjaga keamanan menjadi aktor pembangunan sosial, sejalan dengan konsep keamanan manusia yang menempatkan kesejahteraan sebagai fondasi stabilitas jangka panjang di daerah konflik (United Nations Development Programme, 1994), sekaligus memperkuat indikator legitimasi moral karena konsistensi sikap santun prajurit dan penghormatan terhadap adat lokal menjadi sumber pengakuan otoritas TNI di mata masyarakat Papua. Program Pembinaan Ketahanan Wilayah selaras dengan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan peningkatan kemampuan lokal sebagai instrumen utama membangun ketahanan sosial (Chambers, 1997), sementara Program Pembinaan Pertahanan Wilayah mencerminkan penerapan konsep modal sosial, di mana jaringan sosial berbasis kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi instrumen vital menjaga ketahanan komunitas di wilayah konflik (Coleman, 1990). Keseluruhan program tersebut dijalankan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu adaptif dalam menyesuaikan strategi terhadap perubahan situasi sosial, politik, dan keamanan di lapangan, komunikatif melalui dialog dua arah dengan tokoh masyarakat, gereja, dan adat, serta berkelanjutan dengan memastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut dan dampak jangka panjang, yang sejalan dengan pendekatan strategi militer adaptif yang menekankan kemampuan beradaptasi terhadap konteks sosial budaya lokal dalam wilayah nonkonvensional (Gray, 1999).

Relevansi teori kontra insurgensi terlihat pada bagaimana Satgas berupaya mengosongkan basis dukungan rakyat kepada kelompok separatis melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan loyalitas kepada negara, sejalan dengan empat prinsip dasar kontra insurgensi, yaitu memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai tujuan utama, kekuatan militer sebagai instrumen pendukung bukan tujuan akhir, orientasi

pada pembangunan pemerintahan yang responsif, serta kehadiran fisik dan keberlanjutan program yang lebih bernilai daripada operasi militer sporadis (Galula, 2006). Kerangka Ends Ways Means turut relevan menjelaskan keselarasan strategi Satgas, yaitu tujuan berupa stabilitas wilayah dan kemanunggalan TNI dan rakyat, cara berupa program Binter humanis berbasis pendekatan sosial budaya, serta sarana berupa personel terlatih, dukungan logistik, dan sinergi lintas sektor (Lykke, 1989).

Empat faktor penentu efektivitas yang ditemukan dalam penelitian ini turut memperkuat sejumlah kerangka teori organisasi dan strategi militer. Faktor kualitas dan kesiapan personel sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kemampuan individu dan tuntutan lingkungan kerja (Gibson & Ivancevich, 1996), sehingga personel yang memiliki kepekaan sosial dan kemampuan adaptasi budaya lebih cepat membangun relasi dengan tokoh adat dan masyarakat. Faktor kondisi geografis dan infrastruktur wilayah sejalan dengan pendekatan pengendalian wilayah berbasis komunitas yang fleksibel dan berjangka pendek, yang menuntut penempatan pos bergerak untuk menjangkau daerah terpencil (Gray, 1999). Faktor dukungan logistik dan koordinasi lintas sektor mencerminkan penerapan pendekatan *whole of government* yang menekankan kolaborasi antara unsur militer dan sipil dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan wilayah (Organisation for Economic Co operation and Development, 2011), sementara faktor persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI menegaskan bahwa dukungan masyarakat merupakan elemen kunci stabilitas di daerah konflik (Kaldor, 2012).

Sinergi lintas sektor yang dibangun Satgas dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, tokoh adat, dan aparat kewilayahan merupakan manifestasi teori kolaborasi lintas sektoral, di mana kolaborasi bukan sekadar koordinasi administratif melainkan mekanisme berbagi sumber daya, informasi, dan legitimasi sosial antarpemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *whole of government* yang menekankan sinergi antara unsur militer dan sipil dalam operasi militer selain perang, sehingga program Binter memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan bila dilaksanakan Satgas secara mandiri. Pola pelaksanaan Binter Satgas 305/17/1 Kostrad juga mencerminkan penerapan Model 3 atau Model Sentul, yang memadukan pendekatan perorangan berbasis interaksi langsung prajurit dengan individu masyarakat, pendekatan kelembagaan yang melibatkan koordinasi dengan struktur pemerintahan daerah, adat, dan keagamaan, serta pendekatan teritorial terpadu yang memadukan aspek keamanan, sosial, dan pembangunan dalam satu paket program operasional. Ketiga pilar tersebut bekerja secara simultan, sehingga keberhasilan satu program turut memperkuat efektivitas program lainnya, dan menjadikan model ini relevan sebagai kerangka acuan bagi satuan tugas pengamanan perbatasan lain yang menghadapi karakteristik ancaman serupa.

Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan strategi Binter Satgas juga ditopang oleh peningkatan koordinasi antarlembaga yang memastikan keberlanjutan program pasca penugasan Satgas, melalui sinergi dengan Kodim, Koramil, dan pemerintah daerah yang memungkinkan integrasi kegiatan Binter dengan program pembangunan daerah. Sejalan dengan prinsip *whole of government*, koordinasi lintas sektor ini juga bernilai strategis untuk menghindari duplikasi program dan menjaga kesinambungan kegiatan setelah rotasi satuan berakhir. Meskipun demikian, evaluasi turut mengungkap keterbatasan implementasi berupa keterbatasan sarana transportasi di daerah pegunungan yang membatasi distribusi logistik dan mobilitas personel, rotasi personel yang relatif cepat sehingga hubungan sosial yang telah dibangun perlu dirintis ulang oleh Satgas pengganti, serta minimnya dukungan logistik untuk kegiatan nontempur seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang menegaskan perlunya mekanisme transfer pengetahuan sosial dan kultural antarsatuan tugas agar

kesinambungan pembinaan tetap terjaga. Temuan penelitian ini memperkuat hasil Prakoso (2022) yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pembinaan teritorial di wilayah perbatasan Papua, serta memperluas temuan Lumbanraja (2022) mengenai penguatan kapasitas prajurit dengan menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi budaya personel perlu diikuti oleh model program yang terintegrasi antara komunikasi sosial, pelayanan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan kesiapsiagaan bela negara. Temuan ini juga melengkapi kajian Wahyudi (2020) mengenai dilema pelaksanaan operasi militer selain perang dengan menegaskan bahwa kejelasan mandat dan dukungan logistik akan lebih optimal apabila disertai model strategi yang jelas dan terukur. Berbeda dengan penelitian penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji aspek keamanan, kapasitas personel, atau geografi konflik secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan teritorial di Papua ditentukan oleh integrasi sistemik antara pendekatan militer, sosial, dan kolaboratif dalam satu model strategi yang adaptif, komunikatif, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pembinaan teritorial dengan menunjukkan bahwa konsep soft power, teori kontra insurgensi, teori peran, dan teori kolaborasi lintas sektoral dapat dipadukan dalam satu kerangka analitis tunggal untuk menjelaskan keberhasilan operasi militer nontempur di wilayah rawan konflik, sehingga tidak berhenti pada penjelasan parsial masing masing teori. Secara praktis, model yang dihasilkan memberi kerangka operasional bagi TNI Angkatan Darat, Kodam XVII Cenderawasih, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan teritorial yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Model ini juga relevan diadaptasi oleh satuan tugas pengamanan perbatasan lain yang menghadapi karakteristik ancaman serupa, baik berupa gerakan separatis, kesenjangan pembangunan, maupun kompleksitas sosial budaya, sehingga kehadiran TNI di wilayah operasi tidak semata mata berfungsi sebagai instrumen keamanan, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang memperkuat kohesi nasional dan memperluas jangkauan negara hingga ke wilayah wilayah paling terpencil.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembinaan teritorial Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad di Papua selama tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan melalui pendekatan humanis, persuasif, dan adaptif melalui empat program utama, yaitu Komunikasi Sosial, Karya Bakti dan Bakti Sosial, Pembinaan Ketahanan Wilayah, serta Pembinaan Pertahanan Wilayah, yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi. Efektivitas pelaksanaan strategi tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa kualitas dan loyalitas personel, kemampuan mobilitas Satgas, dukungan komando atas, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan personel dan logistik, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi, serta ancaman propaganda kelompok separatis. Penelitian ini menghasilkan model strategi pembinaan teritorial yang menempatkan pendekatan soft power melalui indikator daya tarik, persuasi, dan legitimasi moral, sinergi lintas sektor, serta pendekatan berbasis budaya lokal sebagai pilar utama, yang layak dijadikan rujukan strategis dalam pengembangan konsep Binter adaptif TNI Angkatan Darat di wilayah rawan konflik dan perbatasan lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada sektor tugas Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Boven Digoel, sehingga generalisasi terhadap wilayah

Papua lainnya perlu dilakukan secara hati hati. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian pembinaan teritorial dengan pendekatan campuran guna mengukur dampak jangka panjang secara kuantitatif, serta menguji penerapan model strategi ini pada satuan tugas pengamanan perbatasan di wilayah rawan konflik lain dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda. TNI Angkatan Darat perlu meningkatkan pelatihan budaya lokal bagi personel Satgas, memperkuat dukungan sarana komunikasi dan transportasi, serta mendorong sinergi lintas sektor yang berkelanjutan bersama pemerintah daerah guna memperkuat efektivitas pembinaan teritorial di wilayah operasi selanjutnya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para pembimbing tesis, Satgas Pamtas Mobile 305/17/1 Kostrad, Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan izin penelitian.

BIBLIOGRAPHY

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543 sampai 571.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). *The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies*. East West Center.
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Galula, D. (2006). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice*. Praeger Security International.
- Gibson, J. L., & Ivancevich, J. M. (1996). *Organizations: Behavior, structure, processes* (9th ed.). Irwin.
- Gray, C. S. (1999). *Modern strategy*. Oxford University Press.
- Hadi, S. (2016). Peran TNI dalam pembinaan teritorial di wilayah konflik: Studi kasus Papua. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 6(2), 45 sampai 60.
- Janowitz, M. (1960). *The professional soldier: A social and political portrait*. Free Press.
- Kaldor, M. (2012). *New and old wars: Organized violence in a global era* (3rd ed.). Polity Press.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Buku putih pertahanan Indonesia 2020*. Kemhan RI.
- Lumbanraja, A. (2022). Penguatan kapasitas prajurit TNI di wilayah konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 18(3), 203 sampai 218.
- Lykke, A. F. (1989). *Toward an understanding of military strategy*. U.S. Army War College.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik administrasi publik Indonesia*. Gramedia.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Organisation for Economic Co operation and Development. (2011). *Whole of government approaches to fragile states*. OECD Publishing.
- Prakoso, R. D. (2022). Peran TNI dalam pembinaan teritorial wilayah perbatasan di Papua. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(2), 89 sampai 105.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Sekretariat Negara RI.

- Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). Strategi pertahanan negara dalam pendekatan kewilayahan. Alfabeta.
- Suryawan, I. (2021). Geografi konflik di Papua dan dampaknya terhadap mobilisasi keamanan. Jurnal Kajian Wilayah, 12(1), 45 sampai 60.
- TNI Angkatan Darat. (2018). Buku putih pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat. Disbinter TNI AD.
- United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.
- Wahyudi, M. (2020). Dilema OMSP dan pembinaan teritorial. Jurnal Strategi Pertahanan, 5(1), 110 sampai 123.
- Widjojo, A. (2004). Paradigma baru TNI: Dari tentara politik ke tentara profesional. Gramedia Pustaka Utama.